

PROBLEMA PENINGKATAN MUTU GURU DI INDONESIA

Fitriani⁵¹

Abstrak: *Guru merupakan komponen paling penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu peningkatan mutu guru secara berkesinambungan dan terarah menjadi kebutuhan tak terbantahkan. Namun demikian, kenyataannya upaya peningkatan mutu guru di Indonesia masih menghadapi kendala-kendala kultural maupun struktural. Kendala kultural berkaitan dengan sikap mental dan budaya guru itu sendiri yang belum berorientasi mutu, sedangkan kendala cultural berkaitan dengan kurangnya apresiasi dan keseriusan pemerintah terhadap upaya peningkatan mutu guru. Akibatnya, di lapangan seringkali ditemukan guru-guru yang kurang profesional dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.*

Kata Kunci: Guru, Mutu, Pendidikan, Kendala Struktural, Kultural.

A. Pendahuluan

Di tengah upaya keras pemerintah membenahi pendidikan, dunia pendidikan kita seolah tak henti dirundung masalah. Salah satu peristiwa cukup menonjol akhir-akhir ini adalah tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oknum guru di sekolah. Misalnya kekerasan yang dilakukan seorang guru di sebuah SMA di Tapanuli terhadap beberapa siswanya karena memecahkan pot bunga sekolah. Dari gambar yang sempat terekam, terlihat jelas bagaimana sang guru memukul dan menendang siswanya hingga kesakitan, sebuah hukuman di luar batas kewajaran. Sebelum itu, dari Sulawesi Barat diberitakan, seorang guru SD memukul muridnya hingga mengalami gangguan pendengaran (tuli). Yang terbaru adalah seorang ibu guru agama di sebuah SMP di kota Bandung yang menyundut siswinya dengan korek api hingga mengalami luka bakar di bagian pipi.

Peristiwa kekerasan seperti itu, tentu sangat mengusik kesadaran kita karena profesi guru secara sosial menempati posisi istimewa dalam masyarakat. Jangankan menganiaya murid atau berbuat asusila, guru terlibat dalam jual-beli buku di sekolah, *nyambi* sebagai tukang ojek atau les privat pun---meski secara hukum tidak dilarang---

⁵¹ STAI Al-Amin Dompu. Jl. Lintas Wawonduru No. 2 Dompu NTB. Email: yanifitriani72@yahoo.co.id

biasanya tetap dianggap kurang ‘etis’ karena dikhawatirkan mencederai martabat guru. Karena itu, betapapun secara ekonomi profesi guru kurang menjanjikan tapi secara sosial tetaplah terhormat. Karena itu, wajar bila masyarakat bereaksi keras bila ada oknum guru yang melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya. “*Anak untuk dididik, bukan dihardik; anak untuk diajar, bukan dihajar*” itulah sejatinya filosofi yang harus mendasari profesi keguruan.

B. Rekrutmen Guru

Secara normatif, regulasi tentang rambu-rambu atau syarat untuk menjadi guru (pendidik) sebenarnya sudah jelas. Dalam pasal 40 ayat (2) UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) misalnya, dijelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan wajib memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Demikian juga dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun PP 74/2008 bahwa seorang guru minimal harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Ini berarti bahwa seorang guru tidak hanya dituntut menguasai dan mempunyai ketrampilan teknis-akademis semata tapi juga harus menjadi pribadi yang hangat, menyenangkan dan berwibawa.

Tetapi mengapa kekerasan sering terjadi? Tentu ada banyak faktor penyebabnya. Salah satu penyebab kesalahan ini ada di tingkat hulu yakni, *perekrutan guru* baik saat tes penerimaan guru maupun di “pabrik” guru di Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti IKIP atau jurusan keguruan. Selama ini, kebijakan yang diskriminatif telah mengakibatkan profesi guru mengandung sejumlah kerancuan. Misalnya, di satu sisi guru dipandang dan diromantisasi sebagai sebuah “profesi” yang mulia dan menentukan kemajuan bangsa tapi di sisi lain justru menjadi profesi yang ‘terbuka’. Profesi guru tidak seketat profesi dokter atau hakim yang tidak sembarang orang bisa memasukinya; sebaliknya, seleksi dan rekrutmen guru begitu mudah dan cair sehingga bisa dimasuki siapa saja. Akibatnya, profesi guru bukan saja kurang profesional tapi juga mengalami distorsi. Kesalahan seperti ini bahkan disahkan melalui undang-undang seperti kebijakan akta IV bagi jurusan nonkeguruan. Kelonggaran

semacam ini telah mereduksi profesi guru seolah sekedar urusan “memegang kapur tulis dan berdiri di depan kelas”.

Kita maklum bahwa kebijakan tersebut diambil karena pemerintah dihadapkan pada masalah jumlah guru yang terbatas. Tetapi, menjadikan profesi guru sebagai ‘daftar menu’ alias ‘toko kelontong’ seperti itu juga amat riskan. Kalau pemerintah serius membenahi mutu pendidikan maka kebijakan berjudi dengan profesi guru semacam itu harus dihentikan. Kita akan membayar *social-cost* yang teramat mahal bila mutu guru dipertaruhkan di atas meja judi sejarah seperti selama ini. Karena itu, kendati aturan main tentang persyaratan menjadi guru sudah ada, tetapi masalahnya adalah bagaimana menjabarkannya secara kongkret di lapangan. Selama ini seleksi dan rekrutmen menjadi guru sama saja dengan pekerjaan atau jabatan lainnya. Kita bersyukur bahwa kebijakan Akta IV bagi nonkeguruan tersebut akhirnya dihentikan.

Karena itu, ke depan kita harus memikirkan dan memperbaiki mekanisme perekrutan guru ini. Secara ideal, seleksi dan rekrutmen guru semestinya mengikuti pola pemilihan ratu sejagat atau *miss universe*. Seperti diketahui, pemilihan ratu sejagat mengacu pada kriteria penilaian 3 B yaitu *brain* (kecerdasan), *behavior* (perilaku) dan *beautiful* (kecantikan). Meski tidak persis sama, namun kriteria penilaian tersebut bisa juga diterapkan dalam rekrutmen guru. Aspek kecerdasan mengacu pada kenyataan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang melibatkan beberapa aspek mental yang kompleks sehingga mensyaratkan kemampuan atau keterampilan tertentu seperti kemampuan akademik dan pedagogis, kecerdasan emosional dan spiritual, kedewasaan dan kematangan sikap. Aspek perilaku menuntut guru untuk menjadi pribadi yang diteladani dan dihormati baik oleh siswanya maupun masyarakat. Profesi guru tidaklah sama dengan pekerja kantoran atau pemain bola yang hanya menuntut profesionalisme tapi terlepas dari nilai-nilai moral. Ketika (mantan) kiper Jerman Oliver Kuhn ketahuan berselingkuh sementara istrinya sedang hamil tua, maka hal itu tidak begitu berpengaruh terhadap profesinya. Kuhn tetap melenggang sebagai kapten Tim Panser karena, di mata publik, yang terpenting dia tetap profesional di lapangan hijau.

Bila melihat dari sisi ini maka profesi guru hakikatnya tidak berbeda dengan juru dakwah (da’i) karena ia mengemban misi kenabian. Profesi guru adalah profesi profetik. Sedangkan aspek kecantikan mengacu kepada pentingnya ‘penampilan’ guru untuk

mendukung kedua aspek sebelumnya. Penampilan (*performance*) juga merupakan sebuah investasi sehingga guru tidak boleh mengabaikan hal ini. Karena itu, seorang guru tidak boleh berpenampilan urak-urakan bagai seniman maupun glamour bak selebritis karena keduanya sama-sama berpotensi mengganggu proses pembelajaran. Kecantikan tentu berdimensi luas baik kecantikan fisik maupun kecantikan budi (*inner beauty*), lebih ideal kalau keduanya terkumpul. Bila ketiga aspek di atas terdapat dalam pribadi guru maka sekolah, bagi siswa, pastilah merupakan lingkungan yang selalu dirindukan, menggugah, menyenangkan dan menggairahkan. Bisa dibayangkan, seandainya siswa kita diajar oleh seorang (ibu) guru seumpama Manohara yang, tidak saja cerdas, menarik, santun, berkepribadian tapi juga cantik!

C. Idealisme Guru

“Berikan saya hukum yang buruk tetapi dengan hakim yang baik, niscaya saya akan mampu menegakkan keadilan”. Pernyataan seorang mantan Hakim Agung Amerika ini sangat populer di dunia hukum. Pernyataan ini hendak menegaskan bahwa baik buruknya suatu sistem pada akhirnya ditentukan faktor ‘manusia’nya. Dalam dunia pendidikan seorang guru pada dasarnya merupakan ‘hakim’ yang akan menentukan keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Jika pembelajaran diibaratkan sebuah mesin (*engine*) maka guru adalah *generator* yang akan menggerakkan komponen-komponen lainnya.

Keberhasilan dalam interaksi dan proses pembelajaran biasanya dipengaruhi beberapa faktor seperti tujuan yang hendak dicapai, bahan pelajaran, metode, media, sarana prasarana, siswa, guru, dan waktu yang tersedia. Dari semua faktor tersebut, gurulah yang paling dominan. Dalam film *Freedom Writer’s* misalnya, kita melihat bagaimana seorang ibu guru muda berjuang keras mengubah suasana sekolah di sebuah daerah pinggiran Amerika dengan karakteristik murid yang beragam: keluarga *broken*, akrab dengan obat-obatan dan miras, miskin, rasialis, serta kohesi sosial yang retak. Dengan kegigihannya, sang guru akhirnya berhasil mengembalikan siswa ke dalam kelas dan menjalani hari-hari di sekolah sebagai hari yang menyenangkan. Di tanah air, sosok ibu Muslimah dalam *Laskar Pelangi* mengilhami kita semua bahwa kecintaan

terhadap profesi bahkan berhasil mengatasi semua keterbatasan yang ada. Kisah nyata ini juga memberi pesan universal bahwa sesulit apapun keadaan, kita tidak boleh menyerah dalam memajukan dan mencerdaskan anak-anak bangsa.

Harus diakui bahwa secara umum mutu guru kita masih rendah. Dirjen PMPTK Fasli Jalal pernah menyebutkan bahwa hampir separuh dari 2,6 juta guru yang ada belum layak mengajar. Penyebab rendahnya mutu guru tersebut cukup kompleks. E. Mulyasa mengidentifikasi terdapat empat faktor keterpurukkan mutu guru yaitu (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh disebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) kemungkinan adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan; dan (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana dosen di perguruan tinggi.⁵²

Dengan demikian, penyebab rendahnya mutu guru ada yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, sebagian masalah tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang cenderung menempatkan pendidikan sekedar sebagai “catatan kaki” dari *grand design* dan paradigma pembangunan nasional kita selama ini. Politisasi dan romantisasi terhadap profesi guru pada masa lalu maupun masa kini, menyebabkan upaya untuk meningkatkan mutu guru tidak pernah dilakukan secara serius.

Sementara secara kultural, peningkatan mutu guru berhadapan dengan budaya masyarakat yang cenderung pragmatis dan instan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk menjadi guru PNS, merupakan ‘pencapaian tertinggi’ dan ‘zona aman’ dalam hidup sehingga kadang mematikan kreatifitas, inovasi dan semangat belajar. Secara khusus, pandangan semacam ini begitu dominan dalam masyarakat pedesaan. Akibatnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru, misalnya melalui sertifikasi, seringkali mengalami distorsi di sana sini. Kita sering melihat misalnya, banyak guru yang mengikuti seminar-seminar sekedar untuk mendapatkan sertifikat guna keperluan kredit poin sertifikasi.

⁵² Lihat E. Mulyasa.(2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosda Karya.

Di pihak lain, sertifikasi disederhanakan sekedar masalah remunerasi atau kesejahteraan, bukan sarana peningkatan kapasitas diri. Padahal faktanya, kesejahteraan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kreatifitas. Bahkan sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan gaji hanya berpengaruh selama empat bulan terhadap kinerja seseorang. Ini sejalan dengan penelitian Douglas B Reeves yang menemukan bahwa pencapaian standar mutu pendidikan yang baik tidak dapat diwujudkan hanya melalui legislasi dan resolusi di parlemen, tapi juga ditentukan oleh pemahaman akan nilai-nilai mutu itu sendiri.⁵³ Ini berarti bahwa peningkatan mutu guru membutuhkan konsistensi yang tinggi dan kesungguhan dari guru itu sendiri. Apalagi berbagai inovasi baru dan teori belajar terus bermunculan seperti konsep PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), kecerdasan ganda, *accelerated learning*, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan lain-lain. Semuanya itu tentu menuntut guru beradaptasi serta terus mengaktualkan kemampuannya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu guru kita tidak hanya membutuhkan *kompetensi* tapi juga *dedikasi*. Guru yang memiliki kompetensi bagus tapi kurang memiliki dedikasi biasanya hanya melahirkan guru-guru yang pandai menuntut hak tapi melupakan kewajibannya. Kita gembira bahwa di era reformasi sekarang kesadaran para guru untuk menuntut hak-haknya sudah tumbuh. Tetapi yang kita butuhkan bukan sekedar kesadaran “unjuk rasa” tapi juga guru yang mampu “unjuk kerja”. Dengan demikian, dalam konteks peningkatan profesional guru dewasa ini maka etos *Oemar Bakri* dalam balada Iwan Fals tetap relevan kita hadirkan, yakni sosok guru jujur-berbakti.

⁵³Lihat Douglas B. Reeves.(2002). *The Leader's Guide to Standards*. San Francisco: Jossey-Bass.

KEPUSTAKAAN

- E. Mulyasa.(2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosda Karya.
- Reeves, Douglas B.(2002). *The Leader’s Guide to Standards*. San Francisco: Jossey-Bass.

